

Lampiran I

Nomor : 054/ 08963

Tanggal : 14 November 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FINALISASI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (RAD TPB/SDGs) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2018 - 2022

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs sendiri adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Komitmen Pemda DIY untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022.

RAD TPB DIY Tahun 2018-2022 disusun dengan melibatkan segenap segenap OPD Pemerintah Daerah DIY, Instansi Vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah serta akademisi, yang kemudian juga terlibat aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Pelibatan berbagai *stakeholder* dalam penyusunan RAD TPB DIY 2018-2022 bertujuan agar pelaksanaan SDGs di DIY menjadi selaras dan kolaboratif antar semua unsur, dan selanjutnya dengan akuntabilitas yang baik akan memacu kualitas pelaksanaan yang efektif dan efisien. Keselarasan ditunjukkan dalam tujuan yang ada dalam TPB yang secara implisit juga merupakan isu pembangunan di DIY, hal ini dijabarkan sebagai berikut :

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
1	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) 2. Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) 3. Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) 4. Ekosistem Lautan (tujuan 14) 5. Ekosistem Daratan (tujuan 15)
2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Kelaparan (tujuan 2) 2. Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3	Masih tingginya ketimpangan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5	Angka kemiskinan masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
6	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (Good Governance) pada semua lini pemerintahan	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
9	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) 2. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) 3. Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9) 4. Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

Hasil evaluasi pelaksanaan SDGs DIY menunjukkan beberapa catatan terhadap kondisi pembangunan di DIY diantaranya : permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, permasalahan hak politik warga, dan permasalahan lingkungan seperti audit energi pada bangunan, pengelolaan sampah regional, luas tutupan lahan dan vegetasi, kawasan hutan tertata dan penanganan kawasan kumuh. Apabila dilihat dari capaian indikatornya, beberapa indikator TPB yang masih perlu perhatian di DIY diantaranya (1) Tingkat kemiskinan daerah (tujuan 1); (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (tujuan 10); (3) Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan Kesehatan (tujuan 1); (4) Bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (tujuan 7); (5) Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan norma K3 (tujuan 8); (6) Koefisien gini (tujuan 10); (7) Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru (tujuan 12); (8) Peningkatan pengelolaan sampah regional (tujuan 15); (9) Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (tujuan 15); (10) Persentase Kawasan hutan tertata (tujuan 15); (11) Indeks hak-hak politik (tujuan 16), dan (12) Penanganan Kawasan kumuh (tujuan 16).

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RAD TPB DIY 2018 - 2022 sehingga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemda DIY akan menyusun RAD TPB untuk periode 2023 - 2027. Dalam penyusunan RAD tersebut diperlukan penguatan komitmen dari seluruh *stakeholder* terkait dan pemahaman yang komprehensif baik dari aspek sunstantif maupun aspek teknis penyusunannya.

Selain itu RAD TPB DIY 2018 – 2022 telah direview dan dikaji oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY dengan tujuan dari hasil kajian diantaranya : 1) Evaluasi pencapaian RAD TPB 2018-2022 pada seluruh target dan indikator yang ada dalam RAD TPB; 2) Analisis situasi terkini dan tantangan pelaksanaan TPB; 3) Analisis kesesuaian indikator dan target RAD TPB terhadap RPD; 4) Evaluasi target dan indikator dalam RAD TPB 2018-2022 disandingkan dengan target dan indikator TPB Nasional (RAN dan Peta Jalan TPB); dan 5) Perumusan rekomendasi kebijakan, target dan indikator terkait dengan pencapaian TPB 2023-2027.

Sebagai langkah awal, BAPPEDA DIY telah melakukan serangkaian kegiatan diantaranya evaluasi atas RAD sebelumnya, koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dan penguatan pemahaman bersama atas isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka penyempurnaan penyusunan RAD SDGs DIY 2023 - 2027, BAPPEDA DIY akan menyelenggarakan Workshop Finalisasi Draft RAD SDGs DIY 2023-2027.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Mensinkronkan kebijakan, program/kegiatan, dan target di tingkat global, pusat dan daerah dalam penyusunan RAD TPB DIY 2023-2027.
2. Mendapatkan masukan dan saran terhadap draft RAD TPB DIY 2023-2027

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Penyusunan draft RAD TPB DIY 2023-2027 yang selaras, sinergis, dan kolaboratif antar level pemerintahan dan *stakeholder* terkait.
2. Penyempurnaan draft RAD SDGs 2023-2027.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 331/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022.

D. Keluaran

Dokumen bimbingan teknis penyusunan draft RAD TPB DIY Tahun 2023 - 2027.

E. Lingkup dan Lokasi Kegiatan

Lingkup kegiatan ini adalah :

1. Evaluasi capaian program/kegiatan percepatan target TPB DIY sebagai bahan penyusunan RAD TPB DIY 2023-2027
2. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan program/dan kegiatan percepatan target TPB DIY.

F. Jadwal Pelaksanaan

Uraian	Bulan											
Penyiapan dokumen administrasi												
Rapat-rapat												
Bimtek Penyusunan RAD TPB												
Laporan Akhir												

G. Susunan Acara

Hari : Senin

Tanggal : 21 November 2022

Jam : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Swiss-Belboutique Hotel

Jl. Jendral Sudirman No.69, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Susunan Acara Bimtek RAD SDG's

Waktu	Acara	Keterangan
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.05	Pembukaan	MC
09.05 – 09.15	Penyampaian Tema Materi para Narasumber	Moderator (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY)
09.15 - 09.30	Pembukaan dan sambutan Pembukaan Finalisasi Penyusunan RAD SDG's Periode 2023 - 2027	Kepala Bappeda DIY

Waktu	Acara	Keterangan
09.30 – 10.00	Penyampaian rancangan final RAD SDG's DIY 2023 2027	Dr. Nur Widiastuti., SE., M.Si STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
10.00 – 10.30	Rencana aksi akademisi dalam mendukung SDG's.	UGM SDG's Center
10.30 – 11.00	Sinkronisasi kegiatan Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Akademisi dan Dunia Usaha dalam rencana aksi SDG's	Sekretariat Nasional SDG's Indonesia
11.00 – 12.00	Diskusi terarah	Moderator (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY)
12.00 WIB	Penutup	MC

H. Peserta

Peserta kegiatan ini adalah: Bappenas RI, OPD di lingkungan Pemda DIY, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, serta unsur *NonGovernment*.

I. Bentuk Kegiatan

Rapat koordinasi dilakukan dalam bentuk *hybrid* (daring dan luring) diselenggarakan dalam format diskusi terfokus. Pertemuan diawali dengan arahan dan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi

J. Biaya

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan biaya APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DIPA BAPPENAS Nomor 055.01.3.040069/2022, 17 November 2021



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

No. 14/LP2M/ST/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev
NIP/NIDN : 0503128301
Jabatan : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si
Jabatan : Dosen STIE Widya Wiwaha

Sebagai Tenaga Ahli Bidang Analisis Perencanaan Tujuan Pembangunan berkelanjutan BAPPEDA DIY untuk menghadiri "Finalisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diselenggarakan Badan Perencanaan Daerah DIY pada:

Tanggal : 21 November 2022
Jam : 09.00 s.d selesai
Tempat : Swiss Belboutique Hotel Yogyakarta

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 14 November 2022
Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha

Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev

DRAFT
RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
DIY 2023-2027

YOGYAKARTA, 21 NOVEMBER 2022

OLEH
TA BIDANG SDGS DIY
DR. NUR WIDIASTUTI., SE., M.SI

OUTLINE

Pendahuluan

EVALUASI CAPAIAN

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN

Good Practice

PENDAHULUAN



[This Photo](#)

Uniknow/Althodops

CC BY-SA-NC

FORMAT RAD SDGS

Sistematika Renaksi SDGs



We support the Sustainable Development Goals



Bab I Pendahuluan

- 1.1. Keselarasan SDGs Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.4. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.5. Metodologi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs
- 1.6. Sistematika Renaksi TPB/SDGs

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 Goals)

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

(Arah kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 Goals)

Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs
- 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Bab V Penutup

Lampiran

1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (*Matriks 2a Pemerintah Pusat/2b Pemda*)
2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (*Matriks 3 LSM, filantropi, akademia, Matriks 4 pelaku usaha*)

FORMAT RAD SDGS

Matriks RAD TPB/ SDGs

1. **Matriks 1** : Matrik Rencana Capaian setiap indikator SDGs, yang memuat indikator SDGs, sumber data, penetapan tahun dasar pada setiap indikator SDGs, dan target pencapaian setiap tahun (rencana capaian pada tataran dampak). Ditampilkan pada Bab 3. dari RAN
2. **Matriks 2 a** : Matrik Rencana Program/Kegiatan Pemerintah (Pusat), memuat program, kegiatan, dan Rincian Output (RO) beserta target tahunan, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran indikatif 5 tahun dari setiap sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat (Hanya ada pada RAN dan tidak ada pada RAD)
3. **Matriks 2b** : Matrik Rencana Program/Kegiatan Pemerintah (Daerah)
4. **Matriks 3** : Matrik Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Organisasi Kemasyarakatan/ CSO/Organisasi Pemuda, Filantropi, Akademia)
5. **Matriks 4** : Matrik Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha/Bisnis)

TARGET YG DIARUSUTAMAKAN

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah target yang diurusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pilar TPB/SDGs

Pilar/Tujuan	Jumlah Target Global	Jumlah Target TPB/SDGs Yang Telah Diurusutamakan	
		RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5)	47	25	38
Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17)	54	30	37
Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15)	56	31	38
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Tujuan 16)	12	8	11
Total	169	94	124

PELAKSANAAN TPB/SDGS DIY, PERMASALAHAN TERKINI (HASIL KAJIAN BIRO PIW&P2)

PILAR SOSIAL

1. **TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN**
2. **KURANGNYA KECUKUPAN DAN KETAHANAN PANGAN**
DALAM DAERAH
3. **STUNTING** DI SEBAGIAN WILAYAH
4. **TINGGINYA PREVALENSI PENYAKIT TIDAK MENULAR**
(PTM)
5. **TINGGINYA PREVALENSI HIV DAN INSIDEN TB** (PENYAKIT
MENULAR)
6. **TINGGINYA KASUS ANEMIA PADA IBU HAMIL**
7. **LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS** BELUM
MERATA
8. **DISPARITAS TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK** ANTAR
KABUPATEN/KOTA.

PILAR SOSIAL

9. **KUALITAS TENAGA PENDIDIK** MASIH TERGOLONG
RENDAH
10. **ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH** BELUM OPTIMAL
11. **TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA** MASIH
TERGOLONG RENDAH
12. **BIROKRASI** DAN PENCATATAN
13. **TINGGINYA KASUS KEKERASAN TERHADAP**
PEREMPUAN
14. **BELUM OPTIMALNYA PARTISIPASI PEREMPUAN**
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

PELAKSANAAN TPB/SDGS DIY PERMASALAHAN TERKINI

PILAR EKONOMI

1. PERLUNYA **KEMANDIRIAN ENERGI** DENGAN PEMANFAATAN EBT
2. TINGGINYA **ANGKA PENGANGGURAN**
3. RENDAHNYA **PRODUKTIVITAS PEKERJA**
4. TERBATASNYA **AKSES MODAL UMKM**
5. PENURUNAN SKALA USAHA EKONOMI LOKAL
6. RENDAHNYA **ADOPSI TEKNOLOGI INDUSTRI**, TERUTAMA IKM
7. RENDAHNYA KAPASITAS **KELEMBAGAAN IKM**
8. **TINGGINYA KESENJANGAN** DI DIY
9. PERLUNYA **PENINGKATAN NILAI EKSPOR**
10. PERLUNYA **PELIBATAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH** DALAM PENCAPAIAN TPB

PILAR LINGKUNGAN

1. **PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK** KE SUNGAI
2. TINGGINYA **CEMARAN AIR SUNGAI**
3. AIR SUNGAI TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI AIR BAKU
4. MASIH TINGGINYA **RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**
5. **PENGELOLAAN SAMPAH** BELUM OPTIMAL
6. **TINGGINYA RISIKO BENCANA** DI SEBAGIAN WILAYAH
7. *FOOD LOSS* DAN *FOOD WASTE*
8. KURANGNYA **PENGELOLAAN LIMBAH B3**
9. PENANGANAN **PERUBAHAN IKLIM** YANG KOLABORATIF
10. PELANGGARAN **PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT**
11. **ANCAMAN BENCANA TSUNAMI** DAN **ABRASI**
12. **KETERBATASAN LAHAN** UNTUK **PERLUASAN KONSERVASI**

No	Tujuan	Capaian
1	Tanpa Kemiskinan	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
2	Tanpa Kelaparan	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan KesejahteraanSeluruh Penduduk Semua Usia
4	Pendidikan Berkualitas	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5	Kesetaraan Gender	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
7	Energi Bersih dan terjangkau	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif

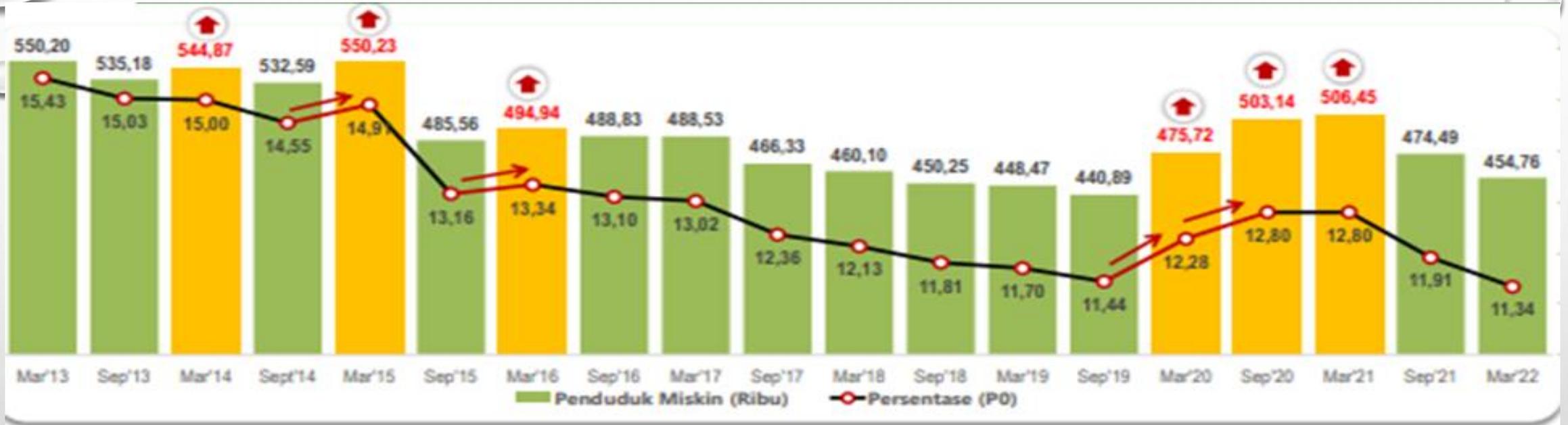
No	Tujuan	Capaian
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12	Konsumsi dan Produksi Yang bertanggungjawab	Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13	Penanganan Perubahan Iklim	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
14	Ekosistem lautan	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem lautan
15	Ekosistem Daratan	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN I; DUNIA TANPA KEMISKINAN



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DIY



Tingkat kemiskinan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi D.I.Y	%	12.13	11.7	12.28	12.8	11.91
Nasional		9.81	9.41	9.78	10.14	9.54

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021
D.I. Yogyakarta	11.70	12.28	12.80
Kulonprogo	17.39	18.01	18.38
Bantul	12.92	13.50	14.04
Gunungkidul	16.61	17.07	17.69
Sleman	7.41	8.12	8.64
Yogyakarta	6.84	7.27	7.64

TUJUAN 1: DUNIA TANPA KEMISKINAN (EVALUASI 2018-2022)

DARI 24 TARGET INDIKATOR, TERDAPAT 9 TARGET YG BELUM TERPENUHI:

1.3.4. TINGKAT KEMISKINAN DAERAH

1.3.6. JUMLAH KELUARGA MISKIN YANG MENDAPATKAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT/ PKH GRADUASI (2018 DAN 2020)

1.4.3. PERSENTASE ANAK BERUSIA 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP. (2020)

1.4.5. PENANGANAN KAWASAN KUMUH

1.4.7. MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/MI/ SEDERAJAT

1.4.8. MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI SMP/MTS/ SEDERAJAT

1.4.9. MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT

1.5.1. JUMLAH DESA YANG SUDAH MENJADI DESTANA/ KATANA

1.5.5. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan					OPD Penanggungjawab
					2023	2024	2025	2026	2027	
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan										
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari									
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					BPS
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPD DIY 2023-2026	%		10,74	10,35	9,93	9,51		BPS
	1. Imunisasi Dasar: Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinkes, Dataku	%	97.25	97.26	97.55	97.95	98.36	98.76	Dinas Kesehatan DIY
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi**		%		100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan DIY
	2. Gizi: <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi)	Dinkes, Dataku	%	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	Dinas Kesehatan DIY
	Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk**	Dinkes	%		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	Dinkes
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan				Digunakan indikator alternatif					
	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan**	Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS	%		27,47 sd 32,38	26,62 sd 31,53	25,77 sd 30,68	24,92 sd 29,83	24,07 sd 28,97	Dinkes
	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitas**	Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS	%		33,95 sd 41,28	32,64 sd 39,97	31,33 sd 38,66	30,03 sd 37,36	28,72 sd 36,05	Dinkes
	4. Lama sekolah: Persentase ART usia 25 –60 tahun yang tidak tamat SMP	RAN TPB 2020-2024			27,23 (Nasional)	25,67 (Nasional)				

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	RAN TPB 2020-2024									Disdikpora
Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun**	Profil pendidikan	%	80,47	81,22	81,97	82,72	83,47	84,22		Disdikpora
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun**	Profil pendidikan	%	93,15	93,90	94,65	95,40	96,15	96,90		Disdikpora
6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	Indikator inverse dari indikator Persentase RT berakses listrik RPD DIY 2023-2026	%			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas PUP-ESDM
7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih					Digunakan indikator alternatif					
Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman**	RPD DIY 2023-2026	%			95,28	95,80	96,48	97,15		Dinas PUP-ESDM
8. Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak					Digunakan indikator alternatif					
Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman**	RPD DIY 2023-2026	%			94,90	96,07	96,54	97,23		Dinas PUP-ESDM
9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²					Digunakan indikator alternatif					
Persentase Rumah Tangga menurut Kako dan Luas Hunian per kapita > 7.2 m ² **	BPS. Statistik Strategis	%			95,79 sd 96,13	95,8 sd 96,13	95,8 sd 96,14	95,81 sd 96,14	95,81 sd 96,15	Dinas PUP-ESDM
10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg					Digunakan indikator alternatif					

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

	Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak (LPG 3kg)	Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS	%		68,87 sd 70,75	69,32 sd 71,2	69,78 sd 71,65	70,23 sd 72,11	70,68 sd 72,56	Dinas PUP-ESDM
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Catatan: Bukan kewenangan Dinsos DIY utk menyajikan data ini, data ada di tingkat kab/kota
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran				Digunakan indikator alternatif					
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Dataku	%		94,34 sd 94,7	94,42 sd 94,78	94,5 sd 94,86	94,58 sd 94,94	94.66 sd 95.02	Biro Tapem
	13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet		%		Digunakan indikator alternatif					Dinas Kominfo
	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS			78,01 sd 100	85,07 sd 100	92,12 sd 100	99,18 sd 100	100	
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Disnakertrans
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Renstra Dinsos	%	N/A	12,49	12,52	12,56	12,61	12,61	Dinas Sosial DIY
	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya**									Dinas Sosial DIY
1.3.1.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes	%	97.2	97,6	98	98,2	98,4	98,6	Dinas Kesehatan DIY
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan				Digunakan indikator alternatif					
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	Renstra Disnaker	Jiwa		449,588	469,819	490,961	513,054	536,142	Disnakertrans

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,									
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar									
	1. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	RPD DIY 2023-2026	%		95,28	95,80	96,48	97,15		Dinas PUP-ESDM
	2. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	RPD DIY 2023-2026	%		94,90	96,07	96,54	97,23		Dinas PUP-ESDM
1.4.1	3. Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas Dasar di Pedesaan		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Dinas PUP-ESDM/Dishub
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar				Digunakan indikator alternatif					
	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi (Persen): Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar**	BPS Pusat. SDGs	%		91 sd 97,67	94,32 sd 100	97,65 sd 100	100	100	Dinkes
	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan									
1.4.2	1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri / Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi	BPS. Statistik strategis / BPS Pusat. SDGs	%		76,07 sd 83,18	77,88 sd 84,98	79,69 sd 86,79	81,49 sd 88,6	83,3 sd 90,4	Dinas PUP-ESDM/BPS
	2. Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi	BPS Pusat. SDGs	%		14,27 sd 17,23	14,52 sd 17,49	14,77 sd 17,74	15,02 sd 17,99	15,27 sd 18,24	Dinas PUP-ESDM/BPS

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

TIGA KEBIJAKAN UTAMA, YAITU:

- 1) PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL,
- 2) PERLUASAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, SERTA
- 3) PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DENGAN PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

- 1) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 2) PEMENUHAN AKSES KELOMPOK RENTAN TERHADAP KEBUTUHAN DASAR
- 3) MENINGKATKAN CAKUPAN JAMKESMAS DAN JAMKESOS
- 4) REHABILITASI SOSIAL
- 5) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETERPADUAN DTKS
- 6) PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DI PERDESAAN.

CONTOH BEST PRACTICE : TUJUAN 1

- **PU PESDM - RTLH**

- PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT MULTI SEKTOR, HASILNYA LANGSUNG MENYENTUH SALAH SATU KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, JUGA PENDORONG TERJADINYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG JIKA DILAKUKAN SECARA BENAR AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. HAL TERSEBUT DISEBABKAN KARENA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAPAT MENDORONG PERTUMBUHAN WILAYAH DAN EKONOMI DAERAH, MENDUKUNG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN MEMBERIKAN EFEK MULTIPLIER TERHADAP SEKTOR LAIN SEPERTI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BAIK YANG LANGSUNG MAUPUN YANG TIDAK LANGSUNG.
- PEMERINTAH DAERAH DIY MEMANDANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DIPERLUKAN DALAM BENTUK FASILITASI DAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN PAPAN SECARA SWADAYA. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMANDANG BAHWA MELALUI KEGIATAN INI AKAN DAPAT MEMBANTU UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KHUSUSNYA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS (PK) RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH LAYAK HUNI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

TUJUAN 2: DUNIA TANPA KELAPARAN



EVALUASI CAPAIAN : DARI 17 INDIKATOR ADA 5 YG BELUM TERCAPAI

- 2.2.3A. PREVALENSI MALNUTRISI/WASTING (BERAT BADAN/TINGGI BADAN) ANAK PADA USIA KURANG DARI 5 TAHUN, BERDASARKAN TIPE: WASTING
- 2.2.3B. PREVALENSI MALNUTRISI/WASTING (BERAT BADAN/TINGGI BADAN) ANAK PADA USIA KURANG DARI 5 TAHUN, BERDASARKAN TIPE: OBESITAS
- 2.2.4. PREVALENSI ANEMIA PADA IBU HAMIL.
- 2.3.2. PRODUKSI TANAMAN PANGAN (2021)
- 2.3.4. POPULASI TERNAK

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan										
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	BPS Pusat	%		8,49 sd 10,73	7,92 sd 10,16	7,35 sd 9,59	6,78 sd 9,02	6,21 sd 8,45	DPKP
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	Renstra DPKP	%							DPKP
	Jumlah Desa Rawan Pangan	DPKP, Dataku		0	0	0	0	0	DPKP	
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1	Prevalensi Stunting	Dinkes	%	17 (2021)	15	14	13,7	13,4	13,2	Dinas Kesehatan DIY
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita	Dinkes	%		5,4	5,2	5	4,9	4,8	Dinas Kesehatan DIY
	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak**	Dinkes, Dataku	%		8,14 sd 8,63	8,03 sd 8,52	7,92 sd 8,41	7,81 sd 8,3	7,7 sd 8,18	Dinas Kesehatan DIY
2.2.2.(a)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	RPD DIY 2023-2026	Skor		94,4	94,5	94,6	94,7	94,8	DPKP
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinkes, Dataku	%	16.5 (2021)	16,4	16,3	16,2	16,1	16	Dinas Kesehatan DIY

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian										
2.3.1	Volume produksi/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)										DPKP
	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan**	Renstra DPKP	%		0,45	0,47	0,47	0,47	0,47		DPKP
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPKP	
	Peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)**	Renstra DPKP	Juta rupiah		7575752	7621206	7670744	7724439	7782372		DPKP
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)										DPKP
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan										
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPKP	
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (untuk lahan baku sawah)		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPKP	
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.										
2.5.1	Jumlah sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPKP	
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerja sama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang										
2.a.1	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	BPS Pusat			Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPKP	

TUJUAN 2; DUNIA TANPA KELAPARAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

NASIONAL;

1 MENGENAI PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI DAN PRIORITAS

3 MENGENAI PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA. DIDALAMNYA TERCAKUP BEBERAPA FOKUS, ANTARA LAIN MENGENAI KECUKUPAN NUTRISI, AKSES PANGAN, SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN, DAN PRODUKSI PANGAN.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

- A. PENURUNAN STUNTING, PERGUB NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024
- B. KEBIJAKAN LAINNYA:
 - 1) PENGUATAN DESA MANDIRI PANGAN;
 - 2) PENERAPAN SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN;
 - 3) PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PANGAN;
 - 4) MEMPERPENDEK RANTAI PASOK PANGAN, MISALNYA MELALUI PASAR MITRA TANI;
 - 5) INTENSIFIKASI PERTANIAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LAHAN DAN DISTRIBUSI SARANA PRODUKSI;
 - 6) UPAYA PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KOMITMEN, KAMPANYE, DAN EVALUASI;
 - 7) PENGUATAN SISTEM SURVEILANS GIZI; DAN
 - 8) PENINGKATAN EFEKTIVITAS INTERVENSI SPESIFIK MELALUI PERLUASAN DAN PENAJAMAN INTERVENSI SENSITIF SECARA TERINTEGRASI

TUJUAN 2: DUNIA TANPA KELAPARAN

CONTOH BEST PRACTICE

• **TPPS GUNUNGKIDUL – PENANGANAN STUNTING (AYUNDA SI MENIK & SEGO CETING)**

- GENERASI BERKUALITAS LAHIR DARI SEORANG IBU YANG BERKUALITAS BAIK KESEHATAN FISIK, MENTAL DAN SPIRITUALNYA. USIA PERKAWINAN ANAK MENJADI SALAH SATU PENYEBAB LAHIRNYA BAYI DENGAN KONDISI BBLR (BERAT BAYI LAHIR RENDAH). DAN BAYI BBLR MENJADI SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA BAYI LAHIR STUNTING (BAYI PENDEK). SAAT INI STUNTING MENJADI PRIORITAS KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL SELAIN TBC (TUBERCULOSIS) DAN PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR).
- TUJUAN DARI INOVASI INI ADALAH SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN YANG ADA, YAITU SEJAK TAHUN 2013 KONDISI ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KECAMATAN GEDANGSARI CUKUP TINGGI SEHINGGA DINAS KESEHATAN GUNUNG KIDUL BESERTA LINTAS SEKTOR BERKOMINTMEN MEMBUAT INOVASI AYUNDA SI MENIK (AYO TUNDA USIA MENIKAH), DAN TAHUN 2021 DIKETAHUI ANGKA STUNTING PADA BALITA SANGAT TINGGI SEHINGGA PERLU UPAYA UNTUK MENDORONG KEGIATAN YANG LEBIH INTENSIF DILAKUKAN, SEHINGGA MELAHIRKAN INOVASI LANJUTAN YAITU SEGO CETING (SEMAGAT GOTONG ROYONG CEGAH STUNTING).

TUJUAN 3; KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



flickr.com/photos/yoadi_tjon

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

EVALUASI CAPAIAN: 24 INDIKATOR ADA 6 YG BELUM TERCAPAI

- 3.1.1. JUMLAH KEMATIAN IBU PADA SAAT HAMIL, MELAHIRKAN, DAN NIFAS (2020 DAN 2021)
- 3.1.3. PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASKES (2021)
- 3.4.1. PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≤ 18 TAHUN. (NA)
- 3.4.2. PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI (2018 DAN 2020), 2019 DAN 2021 NA
- 3.4.3. PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR ≥ 18 TAHUN. (2018 DAN 2020), 2019 DAN 2021 NA
- 3.8.1. CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes, Dataku	kasus	131 (2021)	44	42	39	35	30	Dinas Kesehatan DIY
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinkes, Dataku	%	99,87 (2021)	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	Dinas Kesehatan DIY
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000									
3.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Kasus per setiap 1000 kelahiran hidup	6,99 (2021)	6,76	6,68	6,63	6,6	6,58	Dinas Kesehatan DIY
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, Dataku	Jiwa	210 (2021)	208	207	206	205	204	Dinas Kesehatan DIY
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang (ada di metadata tapi tidak di RAN)	Dinkes, Dataku	Per 1000 orang	0,036 (2022)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	Dinas Kesehatan DIY
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, Dataku	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan DIY
3.3.4	Insiden Hepatitis B	Dinkes, Dataku	%							Dinas Kesehatan DIY
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta									Dinas Kesehatan DIY
		Dinkes	%	75 (2022)	75,5	76	76,5	77	77,5	Dinas Kesehatan DIY
		Dinkes, Dataku	orang	3 (2022)	5	4	4	3	3	Dinas Kesehatan DIY
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Dinkes, Dataku	Kab/Kota	5 (2022)	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan DIY
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan filariasis yang mencapai eliminasi	Dinkes, Dataku	Kab/Kota	5 (2022)	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan DIY

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(a)	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas selama sebulan terakhir merokok tembakau	BPS, Statistik strategis	%		19,92 sd 21,56	19,58 sd 21,22	19,24 sd 20,88	18,9 sd 20,54	18,56 sd 20,2	Dinas Kesehatan DIY
3.4.1.(b)	Jumlah Penderita Hipertensi	Dinkes	%							Dinas Kesehatan DIY
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes, Dataku	%	21,3 (2022)	21,2	21,2	21,1	21	20,9	Dinas Kesehatan DIY
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan									
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Dinkes	orang		210	215	219	223	226	Dinas Kesehatan DIY
3.5.1.(a)		BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK	Orang	146	153	161	169	177	186	BNNP
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK Bantul	Orang	146	153	161	169	177	186	BNNP
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas									
3.6.1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas: Meninggal Dunia	Dishub, Statistik Transportasi, Data Vertikal Polda DIY	Jiwa		248 sd 355	222 sd 329	196 sd 304	170 sd 278	144 sd 252	Dishub

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1 (a)	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	DP3AP2, Dataku	%		76,22 sd 78,67	76,87 sd 79,32	77,52 sd 79,97	78,17 sd 80,62	78,82 sd 81,26	DP3AP2
3.7.1 (b)	Unmet Need kebutuhan ber-KB	BKKBN	%		5,38	5,29				BKKBN
3.7.2	Angka kelahiran menurut umur (ASFR) 15-19 tahun		Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		13	12	11	10	9	BKKBN
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	RPD DIY 2023-2026	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun		1,85	1,83	1,8 s,d, 2,2	1,8 s,d, 2,2	1,8 s,d, 2,2	BKKBN
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Dinkes
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		2,62 sd 3,75	2,42 sd 3,55	2,23 sd 3,35	2,03 sd 3,15	1,83 sd 2,95	Dinkes
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	BPS DIY, Susenas	%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					BPS
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes	%	97.2	97,6	97,8	97,9	98	98	Dinas Kesehatan DIY

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat									
3.a.1	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs / Susenas	%		21,55 sd 23,96	21,4 sd 23,81	21,25 sd 22,83	21,1 sd 23,51	20,95 sd 23,36	Dinkes
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
3.b.1	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		%							Dinas Kesehatan DIY
	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-24 bulan	Dinkes, Dataku	%	97.25	97,26	97.55	97.95	98.36	98.76	Dinas Kesehatan DIY
	Persentase Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap**	96	97	98	99	100	Renstra Dinkes	Dinkes		
3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan DIY
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes	%	5.18 (2021)						Dinas Kesehatan DIY
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinkes	%	92,3	93,31	95,87	97,52	99,17	100	Dinas Kesehatan DIY
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Dinkes	%	80	80	90	90	90	100	Dinas Kesehatan DIY

STRATEGI NASIONAL

STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET TUJUAN 3 TPB, ANTARA LAIN MELALUI

- 1) PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN REPRODUKSI;
- 2) PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT;
- 3) PENINGKATAN PENGENDALIAN PENYAKIT;
- 4) PEMBUDAYAAN PERILAKU HIDUP SEHAT MELALUI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT; DAN
- 5) PENGUATAN SISTEM KESEHATAN.

STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET TUJUAN 3 TPB, KHUSUS DIY:

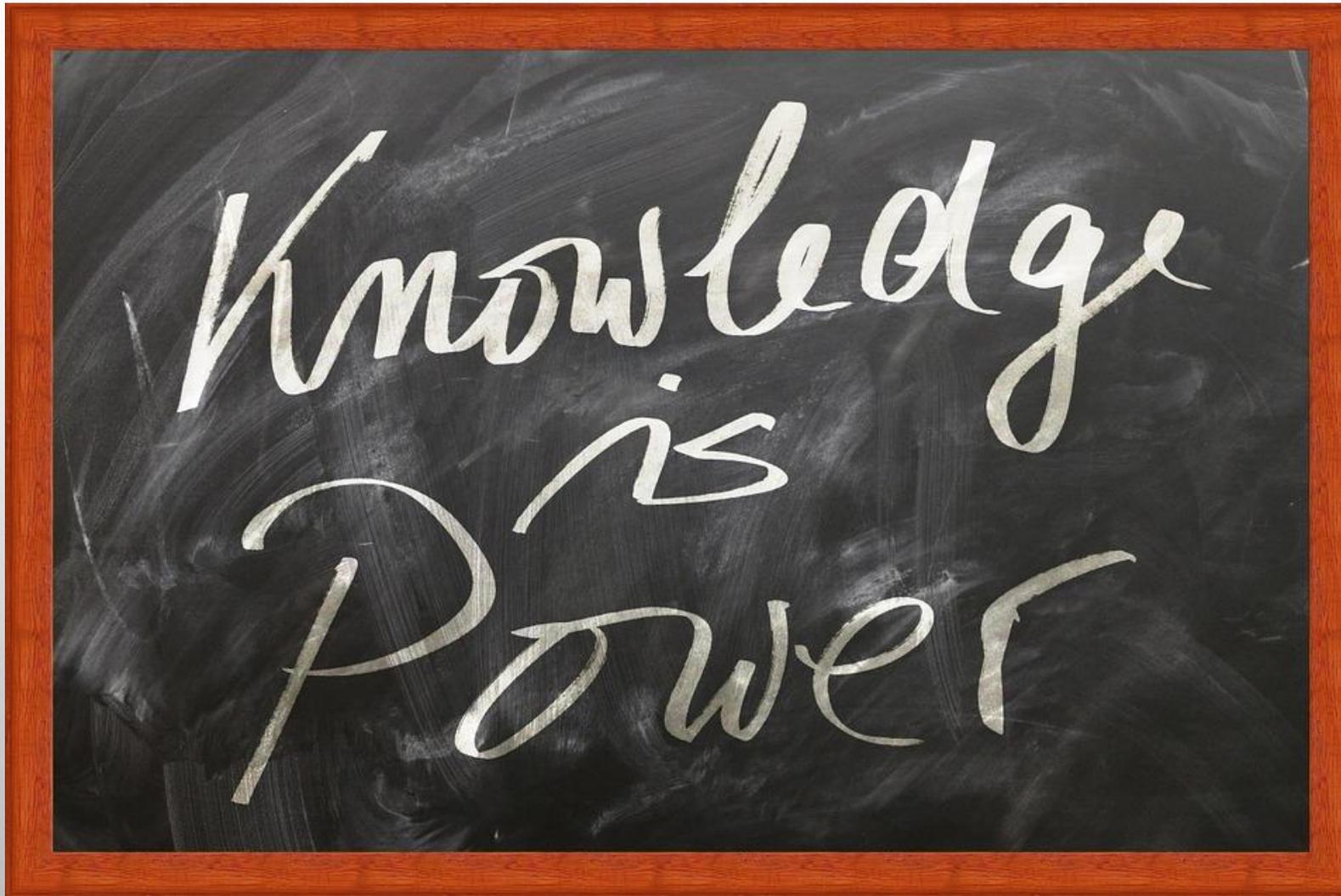
- 1) PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN ANTENATAL, NEONATAL, PERSALINAN, DAN PASCA PERSALINAN
- 2) PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN GIZI DAN TUMBUH KEMBANG ANAK DENGAN PEMBERIAN ASUPAN GIZI SEJAK DALAM KANDUNGAN, PERBAIKAN POLA ASUH, DAN PERBAIKAN SANITASI LINGKUNGAN, SERTA PENYEDIAAN AIR BERSIH
- 3) PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT TERMASUK PERLUASAN CAKUPAN DETEKSI DINI DAN PENGUATAN SURVEILANS *REAL-TIME*
- 4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT
- 5) PENYADARAN MASYARAKAT DAN *HEALTH LITERACY* TERUTAMA DALAM MENANGANI FAKTOR RESIKO PENYAKIT
- 6) PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN YANG DIFOKUSKAN PADA PENGUATAN FUNGSI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA PEMBIAYAAN TERUTAMA DIFOKUSKAN PADA WILAYAH SELATAN DIY.
- 7) PENGUATAN *HEALTH SECURITY*.

CONTOH BEST PRACTICE TUJUAN 3

DISKES – PERCEPATAN VAKSIN COVID-19 & SONJO

- [SONJO](#) ADALAH GERAKAN KEMANUSIAAN FOKUS PADA UPAYA MEMBANTU MASYARAKAT RENTAN DAN BERISIKO TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. KATA *SONJO* (BAHASA JAWA) BERARTI SILATURAHMI DAN KHUSUS UNTUK GERAKAN KEMANUSIAAN INI *SONJO* ADALAH SINGKATAN DARI *SAMBATAN JOGJA*. *SAMBATAN* ADALAH BENTUK GOTONG-ROYONG YANG BANYAK DILAKUKAN DI DAERAH-DAERAH PEDESAAN DI JAWA UNTUK MEMBANGUN RUMAH WARGA/FASILITAS PUBLIK. *SONJO* MENGGUNAKAN WHATSAPP GROUP (WAG) SEBAGAI MEDIA UTAMA DALAM BERKOORDINASI MELAKUKAN BERBAGAI PROGRAM.
- [HTTPS://DINKES.JOGJAPROV.GO.ID/BERITA/DETAIL/HOTLINE-COVID-19-DIY](https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/hotline-covid-19-diy)

TUJUAN 4; PENDIDIKAN BERKUALITAS



EVALUASI CAPAIAN 2018-2022:

- 4.1.1. MENINGKATNYA PERSENTASE SD/MI TERAKREDITASI MINIMAL B (2018 DAN 2020)
- 4.1.2. MENINGKATNYA PERSENTASE SMA/MA TERAKREDITASI MINIMAL B
- 4.1.3. MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT
- 4.1.4. MENINGKATNYA APK SMP/MTS/SEDERAJAT
- 4.1.6. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas										
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika									
	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Renstra Disdikpora	Skor	411	420				425	Disdikpora
	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Renstra Disdikpora	Skor	422	425				430	Disdikpora
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat									
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SD)	BPS Pusat, SDGs	%		96,06 sd 98,47	96,24 sd 98,65	96,42 sd 98,82	96,6 sd 99	96,78 sd 99,18	Disdikpora
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SMP)	BPS Pusat, SDGs	%		94,79 sd 97,2	95,56 sd 97,97	96,34 sd 98,75	97,12 sd 99,53	97,9 sd 100,31	Disdikpora
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SMA)	BPS Pusat, SDGs	%		90,91 sd 93,32	92,45 sd 94,86	93,99 sd 96,4	95,53 sd 97,94	97,07 sd 99,48	Disdikpora
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat									
	Angka Putus Sekolah SD/MI SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat**	Disdikpora, Dataku			0,04 sd 0,11	0,02 sd 0,09	0,01 sd 0,08	0 sd 0,06	0 sd 0,05	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs**	Disdikpora, Dataku			0,03 sd 0,14	0,01 sd 0,12	0 sd 0,11	0 sd 0,09	0 sd 0,08	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SMA/MA**	Disdikpora, Dataku			0,13 sd 0,29	0,12 sd 0,28	0,1 sd 0,26	0,09 sd 0,25	0,07 sd 0,23	Disdikpora

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
4.2.1	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Disdikpora
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		99,53 sd 100	99,74 sd 100	99,94 sd 100	100	100	Disdikpora
4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin									
	(1) usia 15 – 24 tahun		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Disdikpora
	(2) usia 15 – 59 tahun		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Disdikpora
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS Pusat	%		75,65 sd 83,86	77,49 sd 85,7	79,34 sd 87,55	81,18 sd 89,39	83,02 sd 91,23	Disdikpora
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									
4.4.1.(a)	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		99,27 sd 100	99,67 sd 100	100	100	100	Disdikpora
	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		86,48 sd 100	93,86 sd 100	100	100	100	Disdikpora

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

4,5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas										
4.5.1 (i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Perempuan/Laki-Laki Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%	87,90	99,74 sd 100,25	99,79 sd 100,29	99,83 sd 100,34	99,88 sd 100,39	99,93 sd 100,44	Disdikpora	
4.5.1 (ii)	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/ Sederajat	Disdikpora	%	108,22	99	99,5	100	100	100	Disdikpora	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	Renstra Disdikpora	%		84,08	84,78	85,18	85,88		Disdikpora	
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numeras										
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke atas	BPS, statistik strategis	%		95,18 sd 95,72	95,31 sd 95,85	95,43 sd 95,97	95,56 sd 96,1	95,68 sd 96,22	Disdikpora	
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)									Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan	Disdikpora
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir		%							Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan	Disdikpora
4.c	Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil										
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan					Digunakan Indikator Alternatif					
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten**	Renstra Disdikpora	%	94,37	95,88	96,25	96,65	97		Disdikpora	

TUJUAN 4; PENDIDIKAN BERKUALITAS STRATEGI

1. PENJAMINAN KUALITAS PENDIDIKAN YG INKLUSIF DAN MERATA SERTA PENINGKATAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA. (10 TARGET DAN 12 INDIKATOR)
2. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI- LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF
3. BERDASARKAN LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TPB DIY TAHUN 2019, TANTANGAN DARI PENCAPAIAN TUJUAN KEEMPAT ADALAH SEKOLAH KEKURANGAN SDM KARENA SEBAGIAN GURU ADALAH GTT/PTT, JUGA TERDAPAT BEBERAPA SMK YANG SISWA SEDIKIT BAHKAN TERDAPAT SMK YANG TIDAK ADA SISWANYA.
4. DISDIKPORA MENYARANKAN PENAMBAHAN INDIKATOR TERKAIT PENDIDIKAN, YAKNI INDIKATOR TERKAIT KOMPETENSI GURU SUPAYA TUJUAN PENDIDIKAN BERKUALITAS TIDAK HANYA MEMOTRET KUANTITAS SEKOLAH DAN MURID, TETAPI JUGA MEMOTRET KUALITAS PENDIDIKAN.

STRATEGI

BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI YANG DAPAT DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 4, ANTARA LAIN:

- 1) PENGEMBANGAN KAWASAN PENDIDIKAN, PUSAT PENELITIAN, DAN TEKNOLOGI TINGGI;
- 2) PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN TERUTAMA UNTUK WILAYAH SELATAN DIY;
- 3) PEMERATAAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK DAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN;
- 4) OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BOS;
- 5) MEMPERTEMUKAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA DENGAN PENDIDIKAN VOKASI;
- 6) PENINGKATAN MUTU DAN SERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK; SERTA
- 7) SISTEM PENCATATAN DAN AGREGASI DATA PENDIDIKAN YANG TERPADU DARI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA SAMPAI PROVINSI. SEMENTARA ITU, ANGKA TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 4 UNTUK TAHUN 2023-2027 DAPAT DILIHAT DALAM TABEL BERIKUT.

CONTOH BEST PRACTICE, TUJUAN 4

- SISTEM PERPUSTAKAAN TERPADU JOGJA LIBRARY FOR ALL (**SEPATU JOLIFA**) ADALAH SOLUSI CERDAS. SEPATU JOLIFA HADIR DI MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN MELALUI JARINGAN KERJA SAMA ANTAR PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. SISTEM PERPUSTAKAAN TERPADU INI DIBANGUN ATAS DASAR KESADARAN UNTUK BERKOLABORASI DALAM RANGKA MEMENUHI KETERBATASAN SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI. KOLABORASI DILAKUKAN UNTUK SALING MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT MELALUI BERBAGI KOLEKSI BERUPA BUKU CETAK MAUPUN ELEKTRONIK, FASILITAS DAN RUANG PERPUSTAKAAN, DAN SARANA TIK DI PERPUSTAKAAN.
- SEPATU JOLIFA MENAWARKAN LAYANAN SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE. SECARA ONLINE SEPATU JOLIFA DAPAT DIAKSES MELALUI ALAMAT SITUS WWW.JOGJALIB.COM. JENIS LAYANANNYA YAITU INTEGRASI INFORMASI 39 PERPUSTAKAAN YANG MELIPUTI DATA KATALOG BUKU, *E-RESOURCES*, INFORMASI FASILITAS PERPUSTAKAAN, DAN INFORMASI BUKU UNGGULAN.
- “SECARA OFFLINE, SEPATU JOLIFA MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES MASUK PERPUSTAKAAN MELALUI LAYANAN SILANG KUNJUNG, DAN PINJAM BUKU ANTAR PERPUSTAKAAN MELALUI LAYANAN SILANG PINJAM. LAYANAN SILANG PINJAM INI, MENJADI SATU-SATUNYA DI INDONESIA YANG MENERAPKAN KONSEP INTER LIBRARY LOAN (ILL) DI TINGKAT PROVINSI,”

TUJUAN 5; KESETARAAN GENDER



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)

EVALUASI 2018-2022

DARI DELAPAN INDIKATOR ADA SATU YANG BELUM MENCAPAI TARGET

- 5.2.2. PROPORSI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (TAHUN 2018 – 2020)

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 5 : Kesetaraan Gender										
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2	%							DP3AP2
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		persen							Polda DIY
	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **		Kasus		51 sd 109	51 sd 109	51 sd 109	51 sd 109	51 sd 109	Polda DIY
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Polda DIY
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	BPS Pusat, SDGs	persen							DP3AP2
	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		0.61 sd 3.89	0.31 sd 3.59	0.01 sd 3.29	0.01 sd 2.99	0.01 sd 2.69	DP3AP2

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

5.5.1*	(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)	BPS, Statistik Strategis	%		19.99 sd 27.14	21.86 sd 29.01	23.73 sd 30.88	25.6 sd 32.75	27.47 sd 34.62	DP3AP2
	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)	RPD DIY 2023-2026	%		18	18,5	19	19	19	DP3AP3
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan	BPS	%		32.09 sd 47.47	33.84 sd 49.22	35.59 sd 50.97	37.34 sd 52.72	39.09 sd 54.47	DP3AP4

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam				Digunakan Indikator Alternatif					
	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas menurut Apakah Menggunakan Telepon Selular dan Memiliki/menguasai Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat	%		69,5 sd 72,83	70,42 sd 73,76	71,34 sd 74,68	72,27 sd 75,6	73,19 sd 76,52	Diskominfo
	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, baseline 2021: 66.6, 2020: 63.98, 2019: 63.93, 2017: 60.94	%		67,1 sd 70,43	68,4 sd 71,74	69,71 sd 73,05	71,02 sd 74,35	72,33 sd 75,66	Diskominfo
	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, baseline 2021: 73.08, 2020: 71.35, 2019: 71.48, 2017: 70.62	%		71,95 sd 75,29	72,48 sd 75,82	73,01 sd 76,35	73,54 sd 76,88	74,07 sd 77,41	Diskominfo

STRATEGI

UNTUK MENCAPAI TUJUAN 5, KEBIJAKAN DAN STRATEGI YANG DAPAT DILAKSANAKAN, ANTARA LAIN SEBEGAI BERIKUT:

- 1) PENINGKATAN PERAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN, TERUTAMA DALAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI, TENAGA KERJA, SERTA POLITIK, JABATAN PUBLIK, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- 2) PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
- 3) PELIBATAN LEMBAGA NON PEMERINTAH MAUPUN KOMUNITAS UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- 4) PELIBATAN LEMBAGA NON PEMERINTAH MAUPUN KOMUNITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KDT MAUPUN DALAM PERLINDUNGAN DAN ADVOKASI KORBAN
- 5) OPTIMALISASI PELAYANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN DAN ANAK.

CONTOH BEST PRACTICE TUJUAN 5

PANI RADYA – DESA MANDIRI BUDAYA

- PEMDA DIY BERUPAYA UNTUK MENSINERGIKAN PENGEMBANGAN DESA YANG SELAMA INI TELAH BERJALAN SESUAI DENGAN TUGAS FUNGSI MASING MASING OPD YANG TERLIBAT. DENGAN TUJUAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT MAKA PENGEMBANGAN DESA BUDAYA DISINERGIKAN DENGAN DESA WISATA, DESA PRENEUR DAN DESA PRIMA. SEHINGGA PENGEMBANGAN DESA DAPAT BERJALAN SEIRING DARI FAKTOR BUDAYA, PARIWISATA, PEMBERDAYAAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. HAL INI DIDUKUNG MELALUI REGULASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN ANTARA OPD YANG TERLIBAT.
- [HTTPS://JOGJAPROV.GO.ID/PUBLIC/BERITA/KALURAHAN-MANDIRI-BUDAYA-AKTUALISASI-KEISTIMEWAAN-DIY](https://jogjaprovo.go.id/public/berita/kalurahan-mandiri-budaya-aktualisasi-keistimewaan-diy)

TUJUAN 6; AIR BERSIH DAN SANITER YG LAYAK



CLEAN AIR
CLEAN WATER
HEALTHY CITY



EVALUASI CAPAIAN

DARI 6 TARGET ADA 2 INDIKATOR YG BELUM MENCAPAI TARGET

- 6.2.3. JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERBANGUN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA, KAWASAN, DAN KOMUNAL
- 6.3.1. KUALITAS AIR SUNGAI SEBAGAI AIR BAKU/INDEKS KUALITAS AIR SUNGAI

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	RPD DIY 2023-2026	%		92,92	95,28	95,8	96,48	97,15	DPUP -ESDM
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.									DPUP -ESDM
	a. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		83,13 sd 91,95	85,95 sd 94,76	87,49 sd 96,3	89,04 sd 97,85	90,58 sd 99,4	DPUP-ESDM
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	RPD DIY 2023-2026	%	96,18	94,9	96,07	96,54	97,23		DPUP -ESDM
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka		%	Digunakan Indikator Alternatif						DPUP-ESDM
	Persentase KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)**		%		100	100	100	100	100	
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	RPD DIY 2023-2026	%	34,72	35,39	36,05	36,72	37,39		DPUP -ESDM
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPUP-ESDM

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air Sungai	DLHK	%		40,2	41,4				DLHK
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaanya		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DLHK
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DLHK
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentasan									
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)				Digunakan Indikator Alternatif					
	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air**	Renstra DPUPESDM 2023-2026	%		70,53%	80,19%	89,86%	100%	100%	DPUP-ESDM
6,6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau									
6.6.1 *	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)									
	Genangan air	Renstra DPUPESDM 2023-2026	Ha	3,07	3,83	4,59	5,35	6,11		DPUP-ESDM
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	DLHK	Indeks		51,06	51,22				DLHK
	Indeks Kualitas Air Sungai	DLHK	Indeks		40,2	41,4				DLHK
	Kualitas badan air (permukaan dan tanah)		Indeks							DLHK
	Kuantitas akuifer air tanah		Indeks							DLHK

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

- 1) PENINGKATAN LAYANAN PENYEDIAAN AIR MINUM LAYAK DAN AMAN
- 2) PENINGKATAN LAYANAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
- 3) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN SANITASI PERMIKIMAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH
- 4) PENINGKATAN KESADARAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN AIR DAN SANITASI
- 5) PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN POLA PENDANAAN YANG INOVATIF DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

MENINGKATKAN CAKUPAN PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM DAN MENINGKATKAN PERSENTASE PENGGUNAAN AIR MINUM PERPIPAAN. MELALUI SPAM REGIONAL, SPAM IKK, DAN SPAM PERDESAAN

PENINGKATAN LAYANAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPADU.

KELOMPOK MASYARAKAT YANG IKUT SERTA MENJAGA SUNGAI. PADA TAHUN 2020, TERCATAT TERDAPAT DUA PULUH KELOMPOK MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN SUNGAI.

CONTOH BEST PRACTICE TUJUAN 6;

- PADA HARI SENIN TANGGAL 14 MARET 2022, PEMERINTAH KALURAHAN SIDOLUHUR DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN SERTA BANK BPD DIY SEBAGAI PIHAK PENYALUR MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI BANTUAN JAMBANISASI YANG BERTEMPAT DI PENDOPO KALURAHAN SIDOLUHUR. BANTUAN JAMBANISASI INI BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN DAERAH BERSIFAT KHUSUS UNTUK JAMBANISASI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM). ADAPUN SASARANNYA ADALAH YAITU MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERBASIS PADA DATA DTKS. ADAPUN ALOKASI BANTUAN UNTUK KALURAHAN SIDOLUHUR SEBANYAK 39 PENERIMA DENGAN NOMINAL BANTUAN SEBESAR RP 4.000.000,- PER PENERIMA
- PADA KEGIATAN INI ,PENERIMA BANTUAN JAMBANISASI DIBUATKAN NOMOR REKENING BPD DIY YANG NANTINYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENCAIRAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA BULAN JUNI. SEDANGKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JAMBANISASI AKAN DILAKSANAKAN PADA JULI HINGGA SEPTEMBER DENGAN DIMONITORING DAN EVALUASI DARI DINAS KESEHATAN.
- PENGGUNAAN DANA BANTUAN TERSEBUT HANYA UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN TEKNIS YANG DISAMPAI OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN.

TUJUAN 7; ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



ADB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Join the conversation.
#action2015

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



Ensure universal access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all

EVALUASI CAPAIAN 2018 - 2022

DARI 4 TARGET ADA 1 YANG BELUM TERCAPAI

7.3.1. BANGUNAN/GEDUNG PEMERINTAH, KOMERSIAL, DAN
INDUSTRI YANG TELAH DIAUDIT ENERGI

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau										
7.1	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	RPD DIY 2023-2026	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		DPUK - ESDM
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	RAN TPB 2020-2024	kWh/ kapita	1.336 (Nasional)	1.408 (Nasional)					Dinas PUP-ESDM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS, Inkesra	%	78,35 sd 81,04	78,76 sd 81,44	79,16 sd 81,85	79,56 sd 82,25	79,96 sd 82,65		Dinas PUP-ESDM
7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	RAN TPB 2020-2024		56.556 (Nasional)	68.585 (Nasional)					Dinas PUP-ESDM

STRATEGI UT TUJUAN 7

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN TERKAIT ENERGI YANG TERCANTUM DALAM RPJMN 2020-2024, ANTARA LAIN:

- 1) MELAKUKAN DIVERSIFIKASI ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN,
- 2) MENINGKATKAN EFISIENSI PEMANFAATAN ENERGI DAN TENAGA LISTRIK, DAN
- 3) MELAKUKAN PENGUATAN DAN PERLUASAN PELAYANAN PASOKAN ENERGI DAN TENAGA LISTRIK.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

STRATEGI YANG COCOK TERKAIT URUSAN ENERGI ADALAH PENGEMBANGAN SUMBER ENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN BERTENAGA ANGIN, MATAHARI, BIOENERGI, DAN AIR.

DALAM RPD SUDAH TERCATAT RENCANA UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA ENERGI ALTERNATIF DAN PRASARANA ENERGI LISTRIK TENAGA HIBRID DI KABUPATEN BANTUL DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

DPUP-ESDM DIY JUGA MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI ENERGI. HAL PENTING LAINNYA BAGI DIY ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN TATA RUANG YANG HEMAT ENERGI DENGAN DENSIFIKASI DAN PERMUKIMAN VERTIKAL.

TUJUAN 8; PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



EVALUASI CAPAIAN 2018-2022 (8 TARGET)

- 8.1.2. NILAI SUBSEKTOR KEHUTANAN DALAM PDRB DIY (ADHK)
- 8.1.3. NILAI SUBSEKTOR PERIKANAN DALAM PDRB DIY (ADHK) (2019-2020)
- 8.2.1. LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA
- 8.3.1. PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NONPERTANIAN (2019-2020)
- 8.3.2. PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL (2019-2020)
- 8.5.1. UPAH RATA-RATA PERBULAN (2018, 2021)
- 8.5.2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
- 8.5.3. PERSENTASE SETENGAH PENGANGGURAN (2020, 2021)
- 8.8.1. JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3. (2020)
- 8.9.1. MENINGKATNYA NILAI SEKTOR AKOMODASI MAKAN MINUM DALAM PDRB (2020,2021)
- 8.9.2. JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA (2020,2021)
- 8.9.3. JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA (2020,2021)
- 8.9.4. JUMLAH BELANJA (*SPENDING MONEY*) WISATAWAN (2020, 2021)

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%							BPS
8.1.1.(a)	PDB per kapita									
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	BPS	%							BPS
8.3	Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1*	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		52,49	51,99	51,49	50,99	50,49	BPS
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan				Digunakan Indikator Alternatif					Dinas Koperasi dan UKM
	Pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan (Bank dan Lembaga non Bank)**	DiskopUKM	Jumlah Kontrak (penandatanganan dokumen akad pembiayaan)		100	110	120	130	140	Dinas Koperasi dan UKM
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
8.5.1*	Upah Rata - Rata Pekerja Menurut Provinsi	Disnaker	Rp		2.189.029	2.210.919	2.233.028	2.255.359	2.277.912	Disnaker
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnaker	%		3,8	3,63	3,45	3,26	3,12	Disnaker
8.5.2.(a)*	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi		%		5,32	5,15	4,97	4,78	4,64	Disnaker

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan									
8.6.1*	Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah, dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan	Disnaker, Dataku	Jiwa		48.503 sd 67.204	45.859 sd 64.559	43.214 sd 61.915	40.570 sd 59.270	37.925 sd 56.626	Disnaker/BPS
8,7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya									
8.7.1.(a)	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		1,79 sd 2,11	1,73 sd 2,06	1,68 sd 2	1,62 sd 1,95	1,57 sd 1,89	Disnaker/BPS
8,8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	RPD DIY 2023-2026	Perusahaan		262	274	286	298	310	Disnaker
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
8.9.1*	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	%							Dinas Pariwisata
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	%							Dinas Pariwisata
8.9.1.(a)	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Dinas Parwis, Dataku	Jiwa		337.975 sd 361.529	354.630 sd 378.184	371.285 sd 394.839	387.940 sd 411.494	404.595 sd 428.149	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	Dinas Parwis, Dataku	Jiwa		4.045.591 sd 5.883.976	4.839.957 sd 6.678.343	5.761.422 sd 7.599.808	6.830.322 sd 8.668.708	8.070.246 sd 9.908.632	Dinas Pariwisata
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua									
8.10.1*	Mesin ATM Regional	BI	Unit		2.007 sd 2.080	2.014 sd 2.087	2.020 sd 2.094	2.027 sd 2.101	2.034 sd 2.108	OJK
8.10.2*	Jumlah kantor bank	OJK, Statistik Perbankan Indonesia	Unit		61 sd 63	61 sd 63	61 sd 63	62 sd 63	62 sd 63	OJK
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	BI, Statistik Ekonomi	%		35,54	36,12	36,7	37,28	37,86	Dinas Koperasi dan UKM

TUJUAN 8; PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

- 1) Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi;
- 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil;
- 3) Peningkatan produktivitas dan daya saing;
- 4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi terutama sektor keuangan; dan
- 5) Pengembangan sektor pariwisata.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

- 1) Pengembangan daya saing destinasi wisata;
- 2) Pengembangan kepariwisataan berkelanjutan;
- 3) Pengembangan SDM kepariwisataan, termasuk berbasis masyarakat;
- 4) Pengembangan atraksi wisata, terutama yang berbasis budaya;
- 5) Pengembangan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

CONTOH BEST PRACTICE TUJUAN 8

DISKOP UMKM – SIBAKUL

- SIBAKUL JOGJA MERUPAKAN AKRONIM DARI SISTEM INFORMASI PEMBINAAN KOPERASI DAN PELAKU USAHA SEDANGKAN JOGJA ADALAH KATA POPULER DARI WILAYAH DIY
- SIBAKUL JOGJA MERUPAKAN PLATFORM DIGITALISASI LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM; YANG MELINGKUPI : PENDATAAN DAN KLASIFIKASI UKM, PEMBINAAN KUKM, DAN INOVASI FASILITASI PENGUATAN KUKM
- SIBAKUL JOGJA JUGA SEBAGAI PUSAT DATA KOPERASI DAN UMKM PEMDA DIY DIMANA SELURUH KEGIATAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UMKM DI WILAYAH DIY WAJIB TERINTEGRASI DENGAN SISTEM DATA SIBAKUL JOGJA, SEHINGGA DATA RIIL KUMKM YANG SANGAT MEMBANTU MEMBERI GAMBARAN YANG TEPAT POSTUR KEKUATAN KUMKM, SEHINGGA KEGIATAN PEMBINAAN KUMKM DAPAT DIARAHKAN SECARA TEPAT EFEKTIF DAN BERDAMPAK
- SIBAKULJOGJA.JOGJAPROV.GO.ID/APP/BERANDA

TUJUAN 9; INDUSTRY, INFRASTRUKTUR DAN INOVASI



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

EVALUASI CAPAIAN 2018-2022 (7 TARGET)

9.2.1. PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB (2019,2020,2021)

9.2.2. LAJU PERTUMBUHAN PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (2020, 2021)

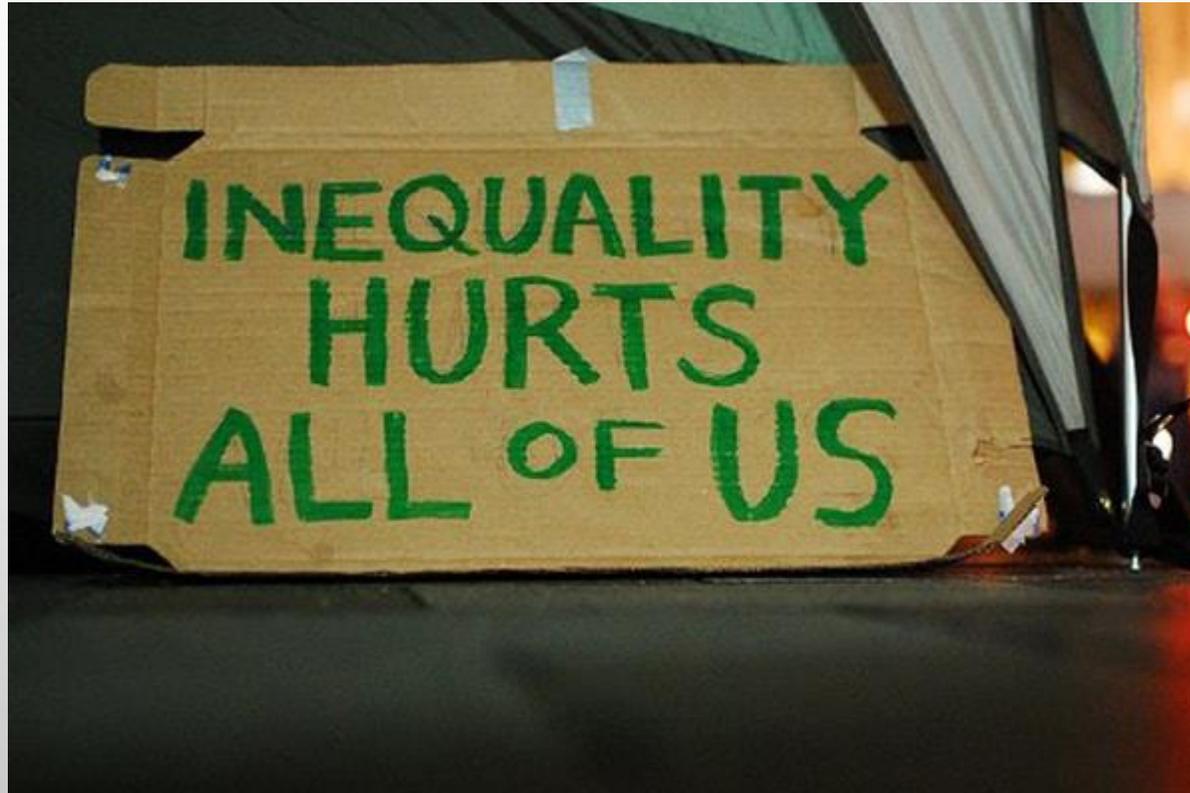
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
9.1.1.(a)	Persentase kemandapan jalan	RPD DIY 2023-2026	%		68,61	69,21	69,81	70,41	71,01	Dinas Perhubungan
9.1.2*	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi, Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs								Dinas Perhubungan
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dishub, Transportasi dalam Angka	Unit		2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	BPS	%		13	13	13	13	13	Disperindag
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	BPS	%							Disperindag
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS, Ekstrapolasi Target 2018-2022	%		4	4	4	4	4	Disperindag/ BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	RAN TPB 2020-2024	%		15,3 (Nasional)	15,7 (Nasional)				Disperindag, BPS
	Persentase penduduk bekerja sektor industri pengolahan**	BPS/ Dataku	%		17,6 sd 20,98	18,28 sd 21,66	18,95 sd 22,33	19,63 sd 23,01	20,3 sd 23,68	
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing									
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Disperindag

STRATEGI

1. KEBIJAKAN YANG COCOK UNTUK MENDUKUNG SEKTOR INDUSTRI DI DIY ADALAH KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, PELATIHAN, PENDAMPINGAN, DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK IKM. PADA GILIRANNYA, SEMUA UPAYA YANG DIUSAHAKAN DIHARAPKAN AKAN BERMUARA PADA PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA.
2. TERKAIT AKSES PASAR, PEMDA DIY PERLU MEMFASILITASI DAN MENDORONG IKM UNTUK MELAKUKAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PRODUKNYA.

TUJUAN 10; BERKURANGNYA KESENJANGAN



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

EVALUASI CAPAIAN 2018-2022

1. 10.1.1. KOEFISIEN GINI
2. 10.1.2. PERSENTASE PENDUDUK YG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
3. 10.3.1. JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAM (NA)
4. 10.3.2. JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAM PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
5. 10.7.1. JUMLAH FASILITAS PELAYANAN PENEMPATAN TKLN BERDASARKAN OKUPASI

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1*	Indeks Gini	RPD DIY 2023-2026	Rasio		0,423	0,419	0,415	0,411	0,407	BPS
10.1.1.(a)	Tingkat Kemiskinan	RPD DIY 2023-2026	%		10,74	10,35	9,93	9,51		BPS
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	IDM, Kemen. PD TT, baseline 2022: 0			0	0	0	0	0	Dinsos
10.1.1.(c)	Peningkatan Jumlah desa Mandiri	RPD DIY 2023-2026	Desa		119	124	129	134	139	Dinsos
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		12,09 sd 12,8	11,93 sd 12,65	11,78 sd 12,49	11,62 sd 12,34	11,47 sd 12,18	BPS
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
10.3.1(a)	IDI Aspek Kebebasan	BPS Pusat	Indeks		91,34 sd 97,07	91,75 sd 97,48	92,15 sd 97,89	92,56 sd 98,3	92,97 sd 98,71	BPS
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	kasus			0	0	0	0	0	Polda DIY
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Polda DIY/ Kanwil Kemenkumham/ DP3AP2
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Biro Hukum/Kanwil Kemenkumham

STRATEGI UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN KESENJANGAN PENDAPATAN DAN KESENJANGAN KEWILAYAHAN, ANTARA LAIN PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, SERTA PENGUATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK Mendukung pertumbuhan.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

KEBIJAKAN DAN STRATEGI YANG DAPAT Ditempuh, antara lain

- 1) PENGUATAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI LOKAL;
- 2) PENINGKATAN AKSES LAYANAN DASAR;
- 3) PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA YANG DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA;
- 4) PENGUATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TERUTAMA BAGI KELOMPOK RENTAN; DAN
- 5) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA SECARA TERPADU.

CONTOH BEST PRACTICE TUJUAN 10

➤ DESKRIPSI INOVASI DIFAGANA: DIFABEL SIAGA BENCANA

- DIFAGANA, AKRONIM DARI DIFABEL SIAGA BENCANA, ADALAH ORGANISASI SUKARELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERISI PENYANDANG DISABILITAS. DIFAGANA DIINISIASI DINAS SOSIAL DIY BERKOLABORASI DENGAN HANDICAP INTERNASIONAL (HUMANITY AND INCLUSION). DIDASARI KONSEP *PEER TO PEER*, YAKNI MEMBERDAYAKAN DIFABEL UNTUK SESAMA PENYANDANG DISABILITAS, DIFAGANA MENJADI PELOPOR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA INKLUSIF DAN AKSESIBEL, YANG MEMILIKI SENSITIVITAS TERHADAP KEBUTUHAN SESAMA PENYANDANG DISABILITAS.
- DIFAGANA MENDUKUNG SEMANGAT SDG'S "*NO ONE LEFT BEHIND*" MELALUI LAYANAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN KE-10 YAITU BERKURANGNYA KESENJANGAN. DIFAGANA MENDORONG KESETARAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERDAMPAK BENCANA, SEKALIGUS TERPENUHINYA HAK PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SESUAI DENGAN TARGET KE-10.3 YAITU MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI, KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG TEPAT TERKAIT LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT.

TUJUAN 11; KOTA DAN PEMUKIMAN YG BERKELANJUTAN



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

EVALUASI CAPAIAN 2018-2022

11.5.4. JUMLAH DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA YANG TERBENTUK

11.5.5. JUMLAH SISTEM PERINGATAN DINI YANG SUDAH TERINTEGRASI.

10.B.1. PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN RENCANA TERHADAP 5 (LIMA) JENIS ANCAMAN BENCANA DI DIY.

10.B.2. PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan										
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	RPD DIY 2023-2026	%	95,65	96,12	96,59	97,05	97,53		DPUP-ESDM
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua									
11.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		34,55 sd 35,61	34,8 sd 35,86	35,05 sd 36,11	35,3 sd 36,36	35,55 sd 36,61	DPUP-ESDM
11.2.1.(b)	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Dishub, Statistik Transportasi	Orang		2.899.949 sd 6.142.271	3.481.430 sd 6.723.752	4.062.911 sd 7.305.233	4.644.392 sd 7.886.714	5225873 sd 8468195	Dishub
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara									
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DPUP-ESDM

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia									
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					BPKA
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang									BPBD
	a. Meninggal		Orang		Tergantung Kejadian					
	b. Luka/Cedera		Orang		Tergantung Kejadian					
	c. Mengungsi		Orang		Tergantung Kejadian					
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.		%		Digunakan Indikator Alternatif					BPBD
	Indeks Risiko Bencana (IRB)**		Skor		104,78	102,78	100,78	98,78	96,78	BPBD
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota									
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah		Persen		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DLHK
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi **	RPD DIY 2023-2026	%		92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	DLHK
	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional**	enstra DLHK 2023-202	%		100	100	100	100	100	DLHK
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM10		µgram/m3		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DLHK
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLHK, Dataku	Indeks		85,28 sd 90,12	84,41 sd 89,25	83,54 sd 88,38	82,67 sd 87,51	81,8 sd 86,64	DLHK

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas									
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DLHK
11.7.2 (a)	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		0,09 sd 0,19	0,07 sd 0,17	0,06 sd 0,16	0,04 sd 0,14	0,02 sd 0,12	Polda DIY
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah									
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS				Digunakan Indikator Alternatif					
	Kabupaten/ kota yang memiliki RTRW dan sudah dilengkapi KLHS**	Bappeda	Kabupaten/Kota		5	5	5	5	5	Bappeda
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030									
11.b.1*	RPB DIY & RAD PRB DIY	BPBD DIY	Dokumen		2	2	2	2	2	BPBD
11.b.2*	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	BPBD DIY	Kabupaten/Kota		5	5	5	5	5	BPBD
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal									
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal		%		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Biro Tapem

STRATEGI UNTUK TUJUAN 11

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

- 1) HUNIAN LAYAK AMAN DAN TERJANGKAU
- 2) TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN
- 3) PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ALAM
- 4) KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM
- 5) KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN
(PENGELOAAN SAMPAH DAN KUALITAS UDARA)
- 6) PENATAAN RUANG

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

- 1) PENGUATAN DAN KOORDINASI UNTUK PENANGANAN RTLH;
- 2) PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA;
- 3) PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH;
- 4) PENERAPAN SISTEM DAUR ULANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH;
- 5) PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PENGUATAN KETANGGUHAN DAERAH;
- 6) PEREMAJAAN DAN OPTIMALISASI EARLY WARNING SYSTEM; SERTA
- 7) PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA.

TUJUAN 12; KONSUMSI DAN PRODUKSI YG BERTANGGUNGJAWAB



EVALUASI CAPAIAN 2018 – 2022 (7 TARGET SASARAN)

PADA RAD SDGS 2018-2022 HANYA DIUKUR DENGAN SATU INDIKATOR SASARAN

12.4.1. JUMLAH PESERTA PROPER YANG MENCAPAI MINIMAL RANKING BIRU

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab										
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan									
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	RAN TPB 2020-2024	%		Pengurangan 27% (Nasional)	Pengurangan 28% (Nasional)				DLHK
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan									
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	RAN TPB 2020-2024	%		20% (Nasional)	20% (Nasional)				DLHK
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	RAN TPB 2020-2024			25.24 (Nasional)	25.25 (Nasional)				DLHK
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita		ton per kapita		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					DLHK
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	RAN TPB 2020-2024	%		100 (Nasional)	100 (Nasional)				DLHK
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	RAN TPB 2020-2024			11,89 (Nasional)	12,8 (Nasional)				DLHK

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka									
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan telah diverifikasi BLH DIY	DLHK, Dataku	Perusahaan		12 sd 28	18 sd 34	24 sd 40	30 sd 46	34 sd 50	DLHK
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Perusahaan							DLHK
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam									
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				Digunakan Indikator Alternatif					
	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)**	Renstra DLHK 2023-2026			40	85	135	190		DLHK
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Biro Tata Pemerintahan
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Dinas Pariwisata
			Lokasi		0	0	0	1	1	Proyeksi seandainya akan diterapkan di DIY

STRATEGI UNTUK TUJUAN 12

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

- 1) PENINGKATAN KESADARAN DAN KAPASITAS DALAM PENERAPAN PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN
- 2) PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3), LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
- 3) PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA, SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA, DAN SAMPAH SPESIFIK
- 4) PENGELOLAAN PANGAN BERKELANJUTAN SERTA PENANGANAN *FOOD LOSS* DAN *FOOD WASTE*.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

1. MEMASIFKAN DAUR ULANG SAMPAH DENGAN BEBERAPA KEGIATAN, DIANTARANYA ADALAH PEMUTAKHIRAN DATA BANK SAMPAH, PENDAMPINGAN BANK SAMPAH, BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN TERKAIT PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH
2. PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN, TERLEBIH LAGI DIY MEMILIKI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3.

TUJUAN 13; PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

EVALUASI CAPAIAN 2018-2022

PADA RAD TPB 2018-2022 HANYA SATU INDIKATOR YAITU:

MENGINTEGRASIKAN TINDAKAN ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM KE DALAM KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN NASIONAL.

DOKUMEN PELAPORAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK).

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1. (a)	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	RAN TPB 2020-2024	Jiwa per 100.000 orang		Maksimal 0,2 (Nasional)	Maksimal 0,2 (Nasional)					BPBD
13.1.1. (b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	RAN TPB 2020-2024			1 (Nasional)	1,15 (Nasional)					BPBD
13.1.2 *	RPB DIY & RAD PRB DIY	BPBD DIY	Dokumen		2	2	2	2	2		BPBD
13.1.3*	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	BPBD DIY	Kabupaten/Kota		5	5	5	5	5		BPBD
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
13.2.2*	Emisi bersih GRK (tCO ₂ -eq) di Daerah Istimewa Yogyakarta	INCAS KLHK	tCO ₂ -eq		26,28 sd 64,66	23,91 sd 62,29	21,55 sd 59,92	19,18 sd 57,55	16,81 sd 55,18		DLHK
13.2.2.(a)	Penurunan emisi GRK	RPD DIY 2023-2026	CO ₂ -eq		2,607	2,609	2,611	2,613	2,615		DLHK
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	RAN TPB 2020-2024			23,22 (Nasional)	23,22 (Nasional)					DLHK
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
13.3.1.(a)	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	Renstra DLHK 2023-2026			40	85	135	190			DLHK
	Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata	DLHK	Sekolah		35	40	45	50	55		DLHK
	Jumlah kampung iklim		Desa		10-May	15-Oct	20-Dec	15-24	20-28		DLHK
	Jumlah peserta Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan										BMKG
	Jumlah desa tangguh bencana		Desa		301						BPBD

TUJUAN 12: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

STRATEGI NASIONAL

1. PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM
2. PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

ADAPTASI DAN MITIGASI DAPAT MENINGKATKAN KETANGGUHAN PROVINSI DIY DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM.

UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DIWUJUDKAN OLEH PEMERINTAH DIY MELALUI BEBERAPA PROGRAM, SEPERTI PROGRAM KAMPUNG IKLIM, KAMPUNG TANGGUH BENCANA, DAN DESA TANGGUH BENCANA. DI D.I. YOGYAKARTA, PROGRAM KAMPUNG IKLIM DIMODIFIKASI MENJADI PROGRAM KAMPUNG HIJAU DENGAN PERBEDAAN YANG TIDAK MENCOLOK.

MELALUI PROGRAM INI, PEMERINTAH BERUPAYA MENDORONG KEPEDULIAN KOLEKTIF DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERIKUT DAMPAKNYA.

TUJUAN 14; EKOSISTEM LAUTAN



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

EVALUASI CAPAIAN 2018-2022

14.5.1. PENINGKATAN STATUS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

14.6.1. PERSENTASE KAWASAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(2020)

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 14: Ekosistem Lautan										
14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi									
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut	RAN TPB 2020-2024			50 (Nasional)	0 (Nasional)				DLHK
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1.(b)	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Renstra DisLautKan 2023-2026	Lokasi		2	2	2	2	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
14.5.1*	Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan	Renstra DisLautKan 2023-2026	%		33	66	66	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	RPD DIY 2023-2026	%		25	50	75	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization									
14.6.1.(a)	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	RPD DIY 2023-2026	%		10	10	10	10	10	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dislautkan			0	1	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dislautkan			1	1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dislautkan			480	480	480	480	480	Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN 14: EKOSISTEM LAUTAN

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL

- 1) PENINGKATAN TATA KELOLA LAUT DAN PENGELOAAN PESISIR SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN, DAN
- 2) 2) PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH PERIKANAN SERTA KESEJAHTERAAN PELAKU KEGIATAN EKONOMI KELAUTAN.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 14, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN;
- 2) PENETAPAN KONSERVASI KAWASAN;
- 3) PERLINDUNGAN TERHADAP NELAYAN, TERUTAMA NELAYAN KECIL;
- 4) MITIGASI ABRASI DENGAN REKAYASA PESISIR;
- 5) PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN UNTUK PENEGAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT; DAN
- 6) PENGUATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN RUANG LAUT SEJAUH 12 MIL LAUT DILUAR MIGAS.

TUJUAN 15; EKOSISTEM DARATAN



EVALUASI CAPAIAN 2018-2022, TUJUAN 14

15.1.1. PENAMBAHAN LUAS TUTUPAN VEGETASI DAN LAHAN TERKONSERVASI

15.2.1. PERSENTASE KAWASAN HUTAN TERTATA (2020,2022)

15.2.2. PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA KEHUTANAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT (2020)

15.2.3. RASIO PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN (2020)

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 15 : Ekosistem Daratan										
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional									
15.1.1*	Kawasan Hutan (luasan)	DLHK, Dataku	Ha		19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.036,42	DLHK
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)		Ha (juta)	ngan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan						DLHK
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global									
15.2.1.(a)	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	RPD DIY 2023-2026	%		68,6	77,98	88,13	100	100	DLHK
	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	Renstra DLHK 2023-2026	%		69,33	78,85	89,41	100	100	DLHK
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
15.3.1*	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	DLHK, Dataku, BPDAS SOP	Ha		235	235	285	285	285	DLHK
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan									
15.4.1*	Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan						DLHK		
15.4.2*	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	DLHK, Dataku			51,06	51,22	59,59 sd 61,09	59,58 sd 62,02	DLHK	

TUJUAN 15: EKOSISTEM DARATAN (12 TARGET)

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UT PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN: PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
2. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM: PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENCEGAHAN PENCEMARAN, KERUSAKAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

HUTAN RAKYAT HARUS MENJADI PERHATIAN KHUSUS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KONSERVASI EKOSISTEM DARATAN.

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN HUTAN JUGA MASIH PERLU DIBINA OLEH BERBAGAI PIHAK.

MENINGKATKAN KUALITAS TUTUPAN LAHAN, TIDAK LAGI BERFOKUS PADA KUANTITAS TUTUPAN LAHAN.

DLHK SETIAP TAHUN MENGUSAHAKAN PENGAYAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TUTUPAN VEGETASI DAN HUTAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

DLHK DIY JUGA MELAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI SERTA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBATAAN KERUSAKAN KAWASAN TAHURA.

**TUJUAN 16; PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN
YG TANGGUH**



EVALUASI CAPAIAN 2018-2022

- 16.1.3. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI 0-17 TH
- 16.7.2. INDEKS HAK-HAK POLITIK
- 16.10.1. JUMLAH OPD PEMDA DIY YANG TELAH MENYUSUN DRAFT INFORMASI PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Polda DIY	kasus		5	5	5	5	5	Polda DIY
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Polda DIY	orang							Polda DIY
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Polda DIY	persentase							Polda DIY
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Kementerian P3A
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Polda/DP3AP2	persen							DP3AP2
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		kasus		0	0	0	0	0	Polda DIY
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Polda/DP3AP2								DP3AP2/Polda DIY
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya		kasus		0	0	0	0	0	Polda DIY

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3AP2	Persen							DP3AP2
16.7.1(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DP3AP2	Persen							DP3AP2
	Indeks Demokrasi Indonesia	RPD DIY 2023-2026			76,72	77,02	77,32	77,62	77,92	BPS
16.7.2(a)	Indeks Demokrasi Aspek Lembaga Demokrasi	BPS, Statistik strategis			75,72 sd 90,34	76,08 sd 90,71	76,44 sd 91,07	76,81 sd 91,43	77,17 sd 91,8	BPS
16.7.2(b)	Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	BPS, Statistik strategis			93,83 sd 100	94,69 sd 100	95,55 sd 100	96,4 sd 100	97,26 sd 100	BPS
16.7.2(c)	Indeks Kesetaraan	BPS, Indeks Demokrasi Indonesia metode baru								

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		94,96 sd 96,9	95,29 sd 97,23	95,62 sd 97,56	95,95 sd 97,89	96,28 sd 98,23	Disdukcapil
16.9.1.(a)	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi (Persen)	BPS Pusat, SDGs	%		97,72 sd 99,3	98 sd 99,58	98,28 sd 99,86	98,56 sd 100	98,84 sd 100	Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen)	BPS Pusat, SDGs	%		98,35 sd 99,93	98,68 sd 100	99,01 sd 100	99,34 sd 100	99,67 sd 100	Disdukcapil
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	RAN TPB 2020-2024			77 (Nasional)	78 (Nasional)				Kanwil Kemenkumham
16.10.1.(b)	Jumlah pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM	Kasus		3 sd 73	0 sd 71	0 sd 68	0 sd 65	0 sd 62	Kanwil Kemenkumham
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DP3AP2	Persen							DP3AP2
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Daerah								
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Daerah								
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidakdiskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					Kanwil Kemenkumham

TUJUAN 16; PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YG TANGGUH (11 TARGET YG DIARUSUTAMAKAN)

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGUATAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN
2. PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA
3. KONSOLIDASI DEMOGRAFI
4. OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
5. PENEGAKAN HUKUM NASIONAL
6. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
7. MENJAGA STABILITAS NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

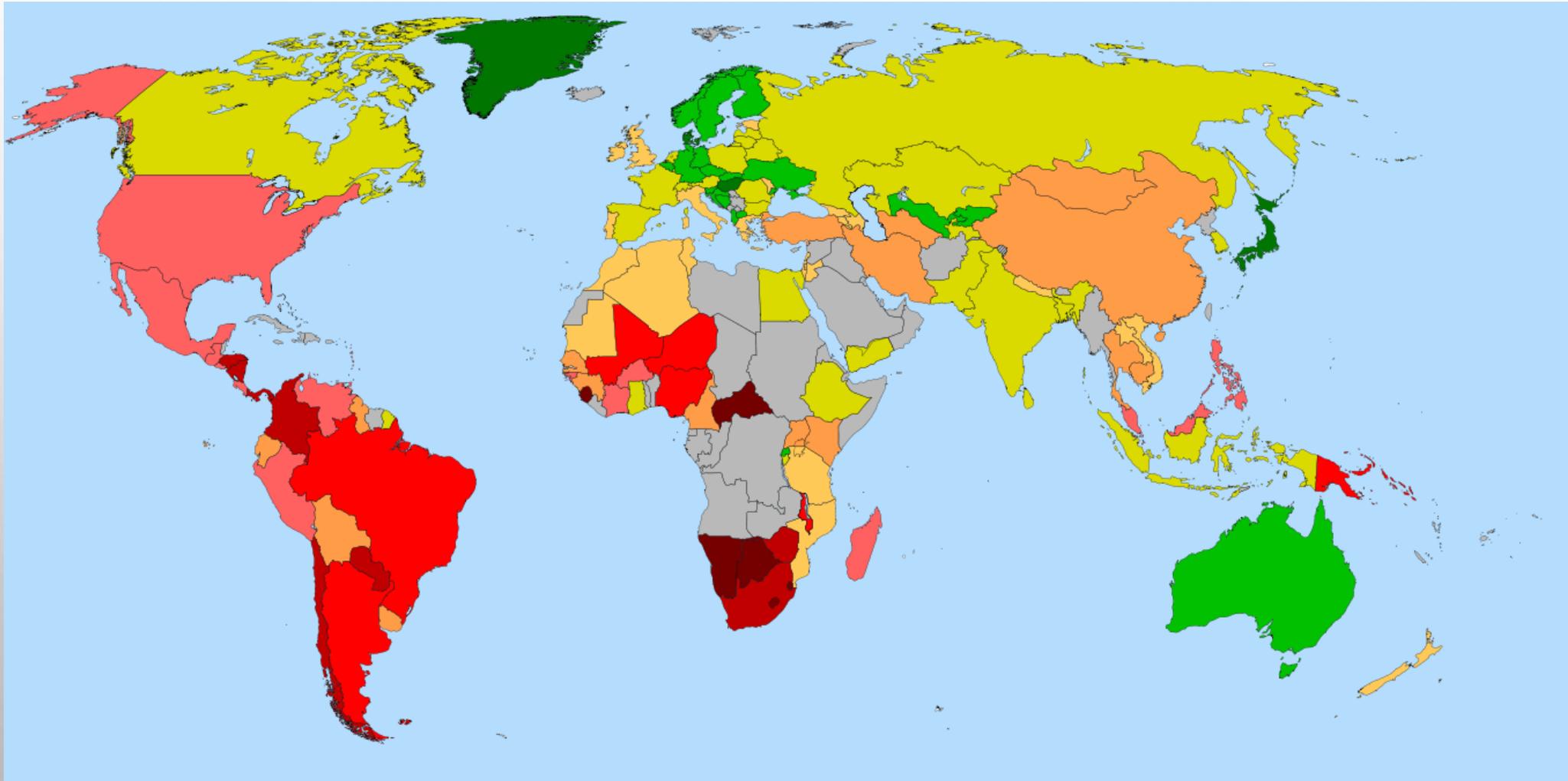
- 1) PENGUATAN LAYANAN KEADILAN BAGI SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
- 2) MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPENDUDUKAN DENGAN PERCEPATAN CAKUPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- 3) PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA
- 4) PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI
- 5) PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
- 6) PENGUATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN, REFORMASI TERKAIT AKUNTABILITAS KINERJA, DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- 7) PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
- 8) PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KALURAHAN.

CONTOH BEST PRACTICE TUJUAN 15

1. BAPPEDA DIY – SENGGUH

- SISTEM EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DAERAH (SENGGUH) DIBUAT OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY), MERUPAKAN PEMBARUAN DARI APLIKASI MONEV JOGJA KENDALI. SENGGUH TELAH DIMANFAATKAN OLEH LEBIH DARI 76 PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 5 KABUPATEN/KOTA, DAPAT DIAKSES LEBIH DARI 11.396 ASN, DAN 55 ANGGOTA LEGISLATIF DPRD DIY, SERTA DAPAT DIAKSES BEBAS OLEH SEMUA KALANGAN MASYARAKAT. SENGGUH DAPAT DIAKSES MELALUI ALAMAT SENGGUH.JOGJAPROV.GO.ID DAN TERBUKA BAGI MASYARAKAT (USER PUBLIK). PADA HALAMAN UTAMA TERSEDIA MENU-MENU DPA, E-SAKIP, E-MONEV, LOGFRAME/KAK, PKKI, ROPK, LINTAS SEKTOR, E-LKPJ, EVALUASI DAN MONEV APBN.
- IDE UTAMA SENGGUH MEMBANTU MEMONITOR DAN MENGEVALUASI KINERJA (SASARAN HINGGA SUB KEGIATAN) DI LINGKUNGAN PEMDA DIY, SEHINGGA EFEKTIVITAS INSTITUSI PUBLIK UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) DAPAT TERCAPAI.
- SENGGUH MENGIMPLEMENTASIKAN TUJUAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN AGENDA 2030 KE-16 YAKNI PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH, DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT.

TUJUAN 17; KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan										
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPKA	Persentase (%)		1,3	1,31	1,32	1,33	1,335	BPKA
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BPKA			1,16	1,165	1,17	1,175	1,179	BPKA
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh PAD	BPKA	Persentase (%)		40,12	40,35	40,85	41,1	41,3	BPKA
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global									
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga, menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs			Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					BPS/Diskominfo
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).		Persentase (%)		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan					BPS/Diskominfo
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi									
17.8.1*	Presentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Menggunakan Internet	BPS, Statistik Strategis	Persentase (%)		74 sd 100	80.57 sd 100	87.46 sd 100	94.36 sd 100	100	BPS/Diskominfo

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020									
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	BPS	Juta USD		539,96 sd 741,72	539,96 sd 769,72	539,96 sd 797,72	539,96 sd 825,72	562,2 sd 853,72	BPS/Disperindag
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama									
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	RAN TPB 2020-2024			1 (Nasional)	1 (Nasional)				Biro PIWP2
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	RAN TPB 2020-2024	Proyek		20 (Nasional)	20 (Nasional)				Biro PIWP2
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.		Nilai investasi (Rp Milyar)		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan				Biro PIWP2	
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang									
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Data Registrasi		Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan				BPS	

TUJUAN 17; KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

19 TARGET GLOBAL: 17 INDIKATOR BERKAITAN DG HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN 8 INDIKATOR BERKENAAN DG PEMANFAATAN DATA BPS.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. PERDAGANGAN MULTILATERAL DAN EKSPOR
2. MOBILISASI SUMBER DAYA DOMESTIC
3. PENGEMBANGAN PENGUKURAN KEPENDUDUKAN
4. AKSES TERHADAP SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
5. KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DIY

- 1) DUKUNGAN TERHADAP PENINGKATAN PERAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN SERTA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
- 2) MENINGKATKAN DIVERSIFIKASI, NILAI TAMBAH, DAN DAYA SAING PRODUK TERUTAMA UNTUK PRODUK EKSPOR
- 3) PENGUATAN INFRASTRUKTUR TIK UNTUK MEMPERLUAS AKSES
- 4) PENCATATAN KONTRIBUSI PIHAK NON PEMERINTAH TERHADAP PENCAPAIAN TPB.

BEST PRACTICE TUJUAN 17

KEGIATAN PROMOSI TERPADU: TRADE, TOURISM, INVESTMENT, CULTURE (TTIC) OLEH DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY

DIY MEMPUNYAI POTENSI UNGGULAN DAERAH DI BIDANG EKONOMI KREATIF YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA. DALAM RANGKA UPAYA MENJEMBATANI POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN PELUANG PASAR DAN INVESTASI DI LUAR NEGERI UTAMANYA DI BIDANG PERDAGANGAN, PARIWISATA, INVESTASI SERTA BUDAYA SECARA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN DIPERLUKAN KOLABORASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT MELALUI KEGIATAN PROMOSI TERPADU DENGAN KONSEP TTIC (TRADE, TOURISM, INVESTMENT, CULTURE).

TAHUN 2019: PENYELENGARAAN KEGIATAN PROMOSI TERPADU “JOGJA DAY”

TAHUN 2022: PARTISIPASI PADA “EXPO 2021 DUBAI ”

BERPARTISIPASI PADA KEGIATAN INDONESIA FESTIVAL FRANKFURT (IFF) PADA TANGGAL 16-18 SEPTEMBER 2022

PENDANAAN DENGAN 2 SKEMA:

1. SKEMA YANG PERTAMA BERUPA SKEMA PENDANAAN REGULER YANG BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH — APBN MAUPUN APBD.
2. SKEMA KEDUA ADALAH SKEMA PEMBIAYAAN KREATIF (*CREATIVE FINANCING*) DI MANA KEGIATAN YANG ADA DI DALAM RAD TPB INI KEMUDIAN DIPILIH UNTUK KEMUDIAN DIDANAI DAN/ATAU DIBIYAI DENGAN MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN NONPEMERINTAH — SEPERTI PIHAK SWASTA, MASYARAKAT ATAUPUN FILANTROPI.

TUJUAN 17; SKEMA PENDANAAN

STRATEGI PENENTUAN SKEMA



THANK YOU